# PEMBANGUNAN PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI PEDESAAN

Atika Wijaya
Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS Unnes

**Abstract**

Agriculture becomes major revenues of rural economic in Indonesia. However, more than 50 percent poor people in Indonesia are farmer. In order to increasing rural economic especially to farmer, Indonesian government need to made some stategic plans of agriculture development. Agriculture and rural economic are two things that effects each other. If agriculture production decreasing then rural economic was decreasing too indirectly. In this article, enclose some recommendation to agriculture development in Indonesia. There are agriculture diversification, empowerment of farmer itself, developing agriculture technology, and new model of agriculture that is organic farming. Main focus is in deversification agriculture so the farmer could get extra incomes from their farming. The most important is the governments should give opportunity and access widely to agriculture sector and farmers.

**Key words:** Agriculture development, rural economic, farmer's income

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris telah sepakat bahwa pertanian merupakan salah satu sumber utama penerimaan dan mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi pedesaan di Indonesia. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia hidup dengan mata pencaharian di sektor pertanian baik sebagai pemilik lahan, petani penggarap maupun buruh tani. Namun, sebanyak tiga perempat dari penduduk miskin di Indonesia adalah penduduk desa yang kehidupannya berkaitan erat dengan sektor pertanian. Petani sebagai tulang punggung perekonomian pedesaan harus menanggung beban berat tanpa memperoleh imbalan yang lebih baik.

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Dalam konteks ini, kemiskinan merupakan ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi politik, sosial dan budaya. Desa yang seharusnya menjadi wilayah penyeimbang bagi perkotaan justru menjadi wilayah yang terpinggirkan dan jauh dari perhatian pemerintah pusat. Desa merupakan gambaran nyata dari kaum marjinal terutama komunitas petani. Kesalahan awal dari masalah kemiskinan di pedesaan berasal dari kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pembangunan pertanian dan pedesaan yang pada kenyataannya justru kurang memperhatikan kesejahteraan petani khususnya dan desa pada umumnya.

Pada masa orde baru, pemerintah pusat menekankan agenda pembangunan pada sektor industri di perkotaan karena pemerintah beranggapan bahwa sektor industri sebagai sektor yang menjanjikan keuntungan dengan relatif cepat. Sedang, pembangunan pertanian mencapai swasembada beras. Orientasi kebijakan yang demikian, jelas menempatkan petani dan sektor pertanian hanya menjadi obyek pembangunan saja. Contoh nyata dari program pemerintah yang tidak tepat sasaran adalah revolusi hijau. Revolusi hijau dikembangkan tahun 1970-an pada mulanya memang menghasilkan produksi beras yang luar biasa tinggi, namun ini bersifat jangka pendek. Konsekuensi yang timbul sesudah masa itu sangatlah besar, terutama yang menyangkut aspek ekologi yaitu tanah yang tidak normal. Konsekuensi dari revolusi hijau tersebut masih kita rasakan hingga kini yaitu impor beras. Pada masa dimana petani sangat terpuruk di negeri lumbung padi ini adalah ketika petani tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Melihat kenyataan di atas, maka yang perlu ditekankan adalah perlunya menciptakan langkah nyata menuju pembangunan pertanian, sehingga pertanian tidak menjadi sektor yang ditinggalkan justru sebaliknya diminati. Pembangunan pertanian yang mampu menggerakkan perekonomian pedesaan.

**PEDESAAN DAN PERTANIAN**

Desa-desa di dunia ini memiliki satu karakteristik utama yaitu adanya lahan pertanian di wilayah tersebut. Eksistensi desa berawal dari kegiatan bercocok tanam yang kemudian semakin berkembang. Pedesaan dan pertanian merupakan konsep yan tidak terpisahkan, meskipun terdapat pedesaan yang mengandalkan perkebunan dan perikanan. Pengertian desa secara umum menurut Bergel, seperti dikutip oleh Rahardjo (1999: 29) adalah suatu wilayah yang dijadikn tempat tinggal secara menetap dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Kelompok-kelompok kecil inilah yang memulai kegiatan cocok tanam yang awalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan kehidupan mereka. Kegiatan bercocok tanam inilah yang kemudian berkembang menjadi pertanian secara luas. Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menempati wilayah teritorial tertentu.

Soekanto (1990: 167) menyebutkan bahwa jika dilihat dari kehidupan bermasyarakat, masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibanding hubungan mereka dengan masyarakat pedesaan di wilayah lain. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem sistem kekeluargaan dan asas gotong royong dan toleransi menjadi bagian dari masyarakat pedesaan. Dari definisi tersebut nyata tersirat bahwa pekerjaan pokok masyarakat desa adalah petani. Meskipun tidak menutup kemungkinan mereka memiliki pekerjaan lain, namun hanya bersifat sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Roucek dan Warren, seperti dikutip oleh Rahardjo (1999: 40) memberikan gambaran karakteristik masyarakat desa antara lain: besarnya peranan kelompok primer (keluarga), faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok, hubungan lebih bersifat intim dan awet, homogen, mobilitas sosial rendah, keluarga lebih ditekankan sebagai unit ekonomi dan populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. Gambaran karakteristik tersebut merupakan kebalikan dari karakteristik masyarakat kota pada umumnya.

Di Indonesia, konsep desa tidak berbeda

dengan yang dijelaskan di atas. Satu hal yang dapat dicermati yaitu bahwa desa-desa di Indonesia sangat beragam sesuai wilayah daerah masing-masing. Desa di Indonesia diatur sebagai wilayah kesatuan administratif dan di beberapa daerah lain desa masih menjadi kesatuan hukum adat. Eksistensi desa sebagai wilayah administratif diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1979 yang berbunyi:

> *"desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Tanah pertanian di Indonesia dapat digunakan secara berpindah (*shifting*) atau secara menetap (*sedentary*). Namun, pada jaman sekarang yang dikelola oleh masyarakat petani adalah pertanian secara menetap. Jayadinata (1999: 67) disebutkan bahwa dilihat dari sejarah dan perkembangan jamannya, maka pertanian di Indonesia dibagi ke dalam 2 fase yaitu pertanian primitif dan pertanian maju.

Pertanian primitif terbagi dalam dua pola yaitu pola pertanian berpindah dan menetap. Pertanian berpindah (*shifting cultivation*) ialah perladangan bakar (milpa) yang disebut juga perladangan liar. bentuknya adalah penduduk desa membuka sebagian dari hutan milik desa dengan menebang pohon-pohonnya dan membakarnya. Tanah yang telah terbuka tersebut diratakan dan ditanami tanaman pangan. Ladang seperti ini tidak dapat bertahan lama, setelah 2-3 kali ditanami maka hasilnya akan berkurang. Setelah tanah ditinggalkan, maka petani mencari lahan lain untuk ditanami hingga akhirnya kembali ke lahan semula yang telah menjadi hutan kembali. Pola kedua adalah pertanian menetap, dimana penduduk desa secara bersama-sama menanam tanaman yang menjadi makanan pokok dan berternak binatang. Pertanian menetap ini muncul karena pertanian berpindah tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman dan pertambahan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka masyarakat memutuskan untuk menetap dan membentuk pemukiman sendiri.

Pertanian maju merupakan wujud perkembangan masyarakat modern. Pertaniannya dicirikan dengan digunakannya peralatan dan metode pertanian yang modern, seperti: traktor, sistem pengairan, pemupukan, pemilihan benih berkualitas, pencegahan hama dan lain-lain. Salah satu bentuknya adalah pertanian sawah terutama di Pulau Jawa. Di Indonesia, pertanian bersawah menggunakan 2 sistem pengairan yaitu sawah tadah hujan, yang mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah, dan sawah irigasi, yang mengalirkan air ke sawah dari kanal-kanal atau parit-parit (sumber air).

## PERTANIAN SEBAGAI SUMBER EKONOMI DESA

Pertanian bagi masyarakat desa merupakan faktor dominan yang berpengaruh besar dalam kehidupan mereka. Sebagian besar masyarakat desa di Indonesia menggantungkan nasibnya pada bidang pertanian. Dengan kata lain, sistem pertanian sama dengan sistem ekonomi masyarakat desa. Jika sistem pertanian dikelola secara baik maka, penghasilan yang diterima masyarakat saat musim panen datang juga mampu mencukupi kebutuhan mereka.

Sistem pertanian pada masyarakat desa merupakan cara bagaimana mereka bisa hidup. Sehingga bagi mereka, sistem pertanian identik dengan sistem perekonomian yang diartikan sebagai cara pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Terdapat faktor-faktor determinan dalam sistem ekonomi desa yang berbasis pertanian di Indonesia yaitu: keluarga,tanah dan pasar.

Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ekonomi pertanian. Pada masyarakat desa prakapitalistik, hasil pertanian ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga (*subsisten*) bukan untuk mengejar keuntungan. Menurut Boeke (1948), seperti yang dikutip oleh Raharjo (1999: 147) bahwasanya keluarga merupakan inti swasembada yang mandiri dalam menghidupi keluarga lewat kegiatan pertanian. Suatu keluarga yang memiliki lahan atau sawah akan menggunakan hasil pertaniannya untuk konsumsi sendiri atau ditukarkan sesuai kebutuhan mereka. Pada keluarga petani Jawa dapat dilihat bahwa keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga eksistensi ekonomi pertanian. Dalam masyarakat desa pertanian, keluarga merupakan satu unit kerja yang mendukung ekonomi keluarga. Pertanian bagi suatu masyarakat dalam konteks unit keluarga merupakan sumber ekonomi yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Faktor kedua adalah tanah. Tanah merupakan salah satu faktor produksi terpenting. Dalam sistem ekonomi pertanian, tanah yang memiliki pengaruh dominan dalam keberlangsungan kegiatan pertanian yang dikelola masyarakat. Akan tetapi, tidak semua petani memiliki lahan sawah sendiri melainkan hanya sebagai petani penggarap. Koentjaraningrat (dalam Rahardjo, 1999: 152) membagi sistem pemilikan tanah di Jawa menjadi empat yaitu: sistem milik umum atau milik komunal dengan pemakaian beralih-alih, sistem milik komunan dengan pemakaian bergiliran, sistem komunal dengan pemakaian tetap, dan sistem milik individu. Seberapa besar tanah mampu mempengaruhi sistem ekonomi pertanian adalah tergantung pada tanah itu sendiri. Mulai dari pola kepemilikan dan penguasaan tanah, kondisi fisik tanah hingga dinamika masyarakat sekitar tanah tersebut. Sekarang ini, tanah merupakan masalah bagi sebagian masyarakat baik petani maupaun non petani.

Faktor ketiga adalah pasar. Pasar merupakan tempat dimana hasil pertanian diperjualbelikan dan ditukarkan dengan kebutuhan petani sehari-hari. Pasar juga memungkinkan para petani menjalin hubungan antar komunitas petani dan bertukar pikiran tentang masalah pertanian yang mereka hadapi. Bagi masyarakat desa, pasar tidak hanya bersifat ekonomi tapi lebih dari itu juga bersifat kultural. Peranan pasar tidak hanya menciptakan sistem ekonomi/pertanian yang menngarahkan berkembangnya ciri khusus komunitas desa, tapi juga menyebabkan semakin berkembangnya jaringan ketergantungan antara komunitas desa yang satu dengan yang lainnya.

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

## PERTANIAN

Tujuan dilakukannya pembangunan pertanian adalah untuk membangun pedesaan itu sendiri dan termasuk di dalamnya adalah masyarakat desa. Syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan pedesaan adalah melalui pembangunan pertanian, berlaku pula sebaliknya. Antara pertanian dan pedesaan tidak dapat dipisahkan, keduanya harus diperhatikan secara seimbang. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah pedesaan. Salah satu langkah dalam perencanaan pembangunan pedesaan adalah dengan pembangunan pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Setidaknya dengan pertanian penduduk desa sudah dapat hidup berkecukupan, tidak perlu mencari pekerjaan di kota (urbanisasi) karena masih banyak lapangan pekerjaan di desa.

Pemerintah dalam program-program pembangunannya selalu menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik desa maupun kota dan pemberdayaan masyarakat kecil. Salah satunya adalah program pembangunan pertanian yang sudah sejak dahulu dilakukan oleh pemerintah dengan program revolusi hijau. Akan tetapi, program tersebut kurang berhasil. Hingga kini masih dicari model pembangunan pertanian yang sekaligus pembangunan perekonomian masyarakat desa.

Mosher, seperti dikutip oleh Long (1987) memilah adanya lima kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan pertanian, yang mungkin dapat dijadikan referensi oleh pemerintah antara lain: (1) akomodasi, berkaitan dengan fasilitas teknis yang dapat diperoleh petani dengan mudah; (2) pasaran barang yang diproduksikan, berkaitan dengan sistem pemasaran dan distribusi hasil pertanian; (3) teknologi pertanian baru, dengan menggunakan alat-alat pertanian yang modern sehingga memudahkan kerja petani sekaligus mampu meningkatkan kualitas produksi pertanian; (4) adanya input-input yang dapat dibeli, dalam proses pengelolaan pertanian dapat berjalan lancar tidak terhalang kendala teknis, seperti kelangkaan pupuk; dan (5) insentif, petani membutuhkan dorongan dan jaminan nyata terutama dari segi ekonomi agar kembali bersemangat dalam mengelola pertanian.

Prof. Bungaran Saragih (2004), dalam Kuliah Tamu di Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa setidaknya ada lima upaya yang harus dilakukan agar akselerasi pertumbuhan sektor pertanian dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan yaitu: (1) merenovasi dan memperluas infrastruktur fisik, terutama sistem irigasi, sistem transportasi, sistem telekomunikasi dan kelistrikan di pedesaan, (2) revitalisasi sistem inovasi pertanian yang menyangkut penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, (3) pengembangan kelembagaan agribisnis yang meliputi: tata pemerintahan, organisasi pengusaha dan usaha kecil, (4) rekonstruksi sistem insentif berproduksi dan investasi, dan (5) pengelolaan pasar input dan output. Prof. Bungaran Saragih menyatakan bahwa sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sektor pertanian merupakan kunci untuk pengentasan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan nasional.

Berikut adalah alternatif pembangunan pertanian yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Pertama, yang sudah diimplementasikan adalah program diversifikasi pertanian. Memang, diversifikasi pertanian bukan program baru tapi msaih relevan untuk dijadikan acuan dalam pembangunan pertanian saat ini. Mubyarto (1996: 81) menyatakan bahwa diversifikasi pertanian adalah penganekaragaman macam dan jenis tanaman pada satu lahan agar lahan tersebut tidak rusak dan tidak mengganggu sistem ekologis tanah. Diversifikasi pertanian dapat memberikan pendapatan lebih bagi petani, namun karena kasi swasembada beras bagi Indonesia maka diversifikasi pertanian tidak boleh mengendurkan upaya pembangunan pertanian padi.

Kedua adalah pemberdayaan petani itu sendiri. Pembangunan pertanian harus diarahkan pada terciptanya petani yang terampil dan berpikiran maju sehinngga mampu mengatasi masalah dan tantangan dalam usaha tani yang ditekuninya kelak. Salah satu upaya pemberdayaan petani adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha tani. Melalui kelompok usaha tani diharapkan petani mampu mandiri dan berbagi pengalaman dengan petani lain dalam rangka mencari pemecahan masalah pertanian.

Ketiga, memperbaiki dan meningkatkan teknologi pertanian di Indonesia. Teknologi pertanian yang digunakan petani Indonesia jauh ketinggalan dengan negara lain. Lambatnya kemajuan teknologi pertanian disebabkan karena adanya polemik di kalangan petani itu sendiri. Pertentangan antara kelompok petani yang masih bertahan dengan peralatan tradisional dengan kelompok petani yang mulai beralih ke peralatan dan teknologi modern. Teknologi pertanian tradisional memiliki kekurangan yaitu tidak mampu meningkatkan produksi pertanian secara maksimal. Sedang, dengan teknologi pertanian yang maju akan menghasilkan produksi pertanian yang maksimal dan lebih efisien, namun akan menimbulkan berkurangnya pekerjaan manusia disamping teknologi tersebut mahal harganya.

Keempat, yang mulai berkembang sekarang ini adalah pertanian tanaman organik. Adanya kesadaran bahwa di dunia yang sudah semakin tidak sehat ini maka pertanian organik menjadi alternatif karena menghasilkan produk-produk yang sehat dan alami karena tidak menggunakan bahan kimia dalam pengelolaannya. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian mulai menyadari bahwa pertanian organik ini perlu dikembangkan karena dalam jangka panjang mampu menyediakan pangan bermutu bagi masyarakat, menghasilkan ketahanan pangan dan pengahsailan yang cukup. Masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan akan memilih bahan pangan organik. Metode pertanian organik juga mampu meregenerasi tanah dan memperoleh kembali keanekaragaman hayati. Hal itu karena pertanian organik menggunakan pupuk kompos bukan pupuk kimia. Masa panen yang lebih sedikit dibandingkan pertanian biasa terbukti mampu mengembalikan keadaan tanah. Pada awalnya usaha pertanian organik ini kurang menguntungkan karena dalam setahun hanya panen 2 kali. Namun, yang perlu diingat adalah manfaat jangka panjang. Kesadaran masyarakat dunia juga sangat tinggi akan kesehatan sehingga mulai beralih ke bahan makanan organik. Hal ini merupakan peluang yang bagus dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang masih mengandalkan pertanian.

Masalah pertanian di Indonesia yang seringkali dijadikan program andalan para calon pemimpin bangsa, dapat menjadi ukuran tingkat keberhasilan bagi pemerintahan yang baru. Bagaimana pemerintahan baru ini memberikan perhatian kepada sektor pertanian dan kesejahteraan para petaninya. Mensinkronkan antara peningkatan produktivitas pertanian dengan penghasilan pertanian secara jangka panjang menuju ketahanan pangan Indonesia. Petani sebagai ujung tombak sektor pertanian, yang perlu dicermati adalah perlunya meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih lanjut.

*Agricultural Sector Review Indonesia* (2003) melaporkan bahwa diperkirakan sekitar 24 juta hektar lahan kering memiliki potensi yang belum dikembangkan. Rumah tangga miskin di daerah tersebut memiliki ketergantungan lebih tinggi pada pertanian, karena sektor perekonomian di luar pertanian sulit berkembang. Diversifikasi menjadi penting, begitu pula berbagai kebijakan yang merangsang tumbuhnya sektor peternakan, tumpang sari sayuran, penanaman kembali hutan-hutan di daerah-daerah kecil dengan tumbuhan berkayu dengan nilai tinggi, serta difersifikasi buah-buahan. Seluruh usaha tersebut dapat berperan serta untuk mencapai penghasilan yang lebih stabil dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pertanian. Di satu pihak, kemajuan di bidang teknologi harusnya menjadi kesempatan bagi sektor pertanian untuk lebih berkembang di aspek peralatan dan teknologi pertanian di Indonesia untuk memaksimalkan proses dan hasil pertanian menjadi lebih efisien.

## PENUTUP

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam potensial namun belum sepenuhnya memberikan perhatian yang nyata pada sektor terbesar di negeri ini yaitu pertanian. Demikian pula dengan kesejahteraan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah petani yang masih belum dapat kita katakan sejahtera dari segi ekonomi. Bahkan pada tahun 2005, pemerintah menetapkan kebijakan impor beras yang sangat memukul para petani karena beras lokal kalah bersaing dengan beras impor yanglebih murah dan berkualitas. Janji pemerintah yang akan mengangkat sektor pertanian tidak mampu dipenuhi. Pemerintah lebih memberikan ruang bagi perkembangan sektor industri. Sektor pertanian sedang dianaktirikan dan bukan tidak mungkin di masa depan pertanian akan semakin ditinggalkan.

Pertanian dan ekonomi pedesaan merupakan dua unsur yang saling terkait dan mempengaruhi. Jika produksi pertanian menurun maka secara tidak langsung ekonomi pedesaan juga menurun. Akibatnya, banyak penduduk desa memilih menjual sawahnya dan mencari pekerjaan di kota atau mendirikan usaha lain di luar pertanian. Intinya, pertanian tidak lagi menjadi prioritas utama bagi sebagian dari mereka. Oleh karen itu perlu adanya, pembangunan pertanian yang mampu menjadikan pertanian kembali menjadi primadona di negara sendiri. Terdapat empat alternatif pembangunan pertanian yang dapat dicobakan oleh pemeirntah di desa pertanian yaitu: diversifikasi pertanian, pemberdayaan petani Indonesia, penggunaan teknologi pertanian yang modern. Keempat, model pertanian organik sebagai alternatif pertanian modern.

Alternatif pembangunan pertanian di atas bisa menjadi sebuah tahap kembalinya pertanian sebagai prioritas utama pembangunan. Selama ini, pemerintah selalu mengejar pembangunan sektor industri dengan teknologi dan modal tinggi dengan mengesampingkan sektor pertanian. Yang paling penting dalam upaya membangkitkan pertanian adalah keberpihakan pemerintah terhadap pertanian dan petani itu sendiri. Kebijakan-kebijakan pertanian harus membela kepentingan kaum petani. Dengan pertanian yang maju maka ekonomi pedesaan dan kesejahteraan petani bukan lagi impian dan eksistensi Indonesia sebagi penghasil produk pertanian akan semakin diakui.

## DAFTAR RUJUKAN


Agricultural Sector Review Indonesia. 2003. *Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia.* Carana Corporation For USAID.

Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB Press.

Long, Norman. 1987. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Bina Aksara.

Mubyarto. 1996. *Ekonomi Pertanian dan Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya